

Pancasila sebagai Landasan Kebijakan Transportasi Publik yang Terintegrasi pada Provinsi DKI Jakarta

Tonny Agung Arifianto

Program Doktorat Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia. Email: tonnya.arifianto@gmail.com

Abstract: *Transport policy is a necessity to create an orderly, safe and comfortable society in a metropolitan city. the growth of public transport at the same time will be the driving force of societal change. DKI Jakarta as a metropolitan city has struggled from time to time to overcome public transportation problems as a solution to social, economic and environmental problems that occur in Jakarta. this paper tries to analyse the DKI Jakarta Provincial government's policy related to the Implementation of an integrated and integrated Transportation System implemented in Jakarta Province since 2021 which is stipulated through Governor Regulation Number 68 of 2021 concerning the Implementation of an integrated and integrated Transportation System associated with Pancasila Values because it is interesting that the policy of integrating transportation as a public policy solves economic, social and environmental problems. Based on the results of the analysis, it is found that the policy of integrating public transportation if in accordance with Pancasila values will create an impact in creating social cohesion and supporting environmental and economic justice for the people of DKI Jakarta Province.*

Keywords: *Policy; Public Transport; the Actualisation of Pancasila Values.*

Abstrak: Kebijakan transportasi merupakan sebuah keharusan untuk menciptakan tatanan hidup masyarakat yang tertib, aman dan nyaman pada sebuah kota metropolitan. pertumbuhan transportasi publik pada saat yang sama akan menjadi roda penggerak perubahan masyarakat. DKI Jakarta sebagai sebuah kota metropolitan telah berjuang dari masa ke masa pemerintahan untuk mengatasi permasalahan transportasi publik sebagai solusi bagi problematika sosial, ekonomi dan lingkungan yang terjadi di Jakarta. tulisan ini mencoba menganalisis kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Transportasi terpadu dan terintegrasi yang diterapkan di Provinsi Jakarta sejak tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi terpadu dan terintegrasi dikaitkan dengan Nilai-nilai Pancasila karena menarik bahwa kebijakan pengintegrasian transportasi tersebut sebagai kebijakan publik menyelesaikan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kebijakan pengintegrasian transportasi publik jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan *impact* dalam menciptakan kohesi sosial serta mendukung keadilan lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

Keywords: Kebijakan; Transportasi Publik; Aktualisasi Nilai Pancasila.

1. Pendahuluan

Pemerintahan memiliki relasi sangat dekat, intensi dengan masyarakat. pemerintahan sebagai gambaran dari sebuah peradaban bangsa sejalan dengan pernyataan *Rosevelt* dalam Rasyid yang menyatakan “Jika Ingin mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya” (Rias Rasyid, 1998). pandangan tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan merupakan bagian dan penentu dari sebuah peradaban Manusia, realitas tersebut menggambarkan secara konstruktif bahwa kehadiran sebuah pemerintahan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Relasi antara pemerintah dan masyarakat dibangun atas dasar kepercayaan di mana Masyarakat membentuk Pemerintahan secara demokratis sehingga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang substantif dalam kebijakan-kebijakannya mampu menciptakan

kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya (Muchlis Hamdi, 2013).

Peranan pemerintahan sebagai pemelihara kelangsungan dan legitimasi tatanan sosial, Ekonomi dan Politik agar setiap individu dapat hidup bersama-sama secara wajar. Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila sebagai *Weltanschauung* (Cara Pandang) dalam tatanan pemerintahan dan perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus berkembang menyambut kemajuan. Kemajuan yang dihadapi dalam berbagai kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa menjadikan pemerintahan terus menyesuaikan kebijakannya, sejalan dengan kemajuan dan pertumbuhan yang terjadi secara cepat dan dinamis, sebagai cara pandang Pancasila memiliki peran sebagai salah satu katalisator definisi problem kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi seluruh negara maju dan kota metropolitan adalah masalah transportasi publik sebagai konsekuensi dari pertumbuhan dan perkembangan Kawasan perkotaan (Schobel, 2006). isu krusial yang selalu dikaitkan dengan perkembangan kawasan perkotaan dan transportasi adalah kemacetan yang dihadapi sebagian besar kota-kota besar di dunia misalnya: Tokyo, Los Angeles, Sao Paulo, Moscow, Shanghai, Mumbai, New York dan Seoul yang telah memiliki perkembangan teknologi dan sistem transportasi yang sangat maju (Sumaedi et al., 2014). Jakarta sebagai kota yang mengalami perkembangan perkotaan dan transportasi sama seperti kota besar di atas juga menghadapi permasalahan yang sama yakni kemacetan, berdasarkan data *Tomtom Traffic Index* tahun 2022 Jakarta merupakan salah satu kota yang paling macet dari 19 kota dengan jumlah penduduk di atas 8 Juta Jiwa dengan nilai indeks 22,7 dari 40 poin (Tomtom Traffic Index, 2023). Realitas tersebut di atas, menunjukkan bahwa tingginya mobilitas penduduk dan barang di wilayah Provinsi DKI Jakarta belum diimbangi dengan ketersediaan transportasi publik yang memadai, aman dan nyaman, sebagai dampak dari pertumbuhan jumlah penduduk yang sudah mencapai 10 juta jiwa dengan pertumbuhan sekitar 0,56% dan jumlah kendaraan bermotor telah mencapai 21 juta 4,6% pada wilayah provinsi DKI Jakarta, selain itu LPSK mencatat pada tahun 2022 telah terjadi 3.539 kejahatan seksual yang terjadi di transportasi publik (Berita Satu, 2023). data -data tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan transportasi publik masih belum mengakomodir harapan seluruh penduduk tentang layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan inklusif.

Isu transportasi publik pada era sekarang tidak lagi dipahami sebagai isu perpindahan orang semata, tetapi perlu dipandang secara komprehensif sebagai sebuah isu peradaban yang perlu dilakukan penataan secara serius melalui kebijakan-kebijakan pemerintahan yang tepat sasaran. sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan isu krusial transportasi publik telah menerbitkan banyak sekali kebijakan publik diantaranya-Nya Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu dan Terintegrasi. kebijakan transportasi tersebut hadir juga untuk mengatasi berbagai permasalahan sistem dan teknis transportasi publik yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. dengan diterbitkannya kebijakan tersebut diharapkan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat, serta menjadikan isu pengelolaan transportasi publik merupakan kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan masa depan penduduk kota. kajian ini akan fokus pada kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu dan Terintegrasi sebagai bentuk dari aktualisasi nilai Pancasila oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan pelayanan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

2. Pembahasan

2.1. Konsep Ideal Kebijakan Transportasi

Lahirnya sebuah kebijakan bukan tidak mungkin akan mengakibatkan masyarakat yang hidupnya sudah susah akan menjadi semakin susah, hal tersebut terjadi ketika pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak didasari atas pola pikir pemerintahan yang efektif (Riant Nugroho, 2018). Kebijakan publik sebagai produk dari pemerintahan akan selalu terkait dengan nilai yang menjadikan manusia sebagai objek (Muchlis Hamdi, 2024), hal ini menunjukkan interaksi antara pemerintahan dan masyarakat akan selalu terjadi dalam ruang dan waktu tertentu. pemerintahan dengan keistimewaannya melalui kewenangan yang dimilikinya dapat mengalokasikan nilai-nilai tertentu sebagai dasar relasi yang ingin dibangun antara masyarakat dengan dirinya. kebijakan lebih luas dibandingkan dengan hukum, karena kebijakan hadir untuk memberikan kehidupan publik yang paling hebat. Relasi pemerintah dan masyarakat di Indonesia perlu dilandasi oleh kesepahaman terkait dengan kondisi, kebutuhan dan urgensi dari kebijakan tersebut. hal tersebut dikarenakan sepanjang hidup manusia pada suatu wilayah pemerintahan, akan dipengaruhi oleh kebijakan publik yang diambil hal tersebut disebabkan luasnya kewenangan pemerintahan mengatur dan melayani kehidupan masyarakat. lahirnya sebuah kebijakan publik disebabkan adanya sebuah kondisi/keadaan yang tidak dapat diterima oleh kalangan masyarakat atau menghambat kelangsungan hidup masyarakat, untuk itu pemerintah perlu mengambil bagian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. aktualisasi kebijakan publik akan menjadi kinerja pelaksana kebijakan yang akan mempengaruhi kepuasan dan kepercayaan masyarakat (Riant Nugroho, 2018). Pada kenyataan menurut Riant Nograho yang pernah bahkan sering terjadi terdapat banyak sekali kegagalan dalam pembuatan kebijakan, setidaknya ada 6 (enam) kriteria kegagalan Kebijakan yang pernah terjadi di Indonesia (Riant Nugroho, 2018: 27-33).

Kebijakan sebagai sebuah sistem akan memberikan berbagai akibat pada kehidupan masyarakat, karena kebijakan akan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. sejalan dengan itu Ghani dan Lockhart menjelaskan bahwa: *“public policy is all around us, defining our daily experiences and life change even if we cannot see it”* (Ashraf Ghani and Clare Lockhart, 2008). penjelasan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan public merupakan bagian dari kehidupan keseharian masyarakat sama halnya tentang transportasi publik yang merupakan kebutuhan masyarakat perlu mendapatkan perhatian dari pengambil keputusan. kebijakan transportasi Jakarta yang telah diatur melalui peraturan Gubernur nomor 68 tahun 2021 hingga saat ini masih belum mampu menjadi solusi yang komprehensif bagi penyelesaian permasalahan transportasi publik Jakarta. hal tersebut terlihat kongkret dari angka kemacetan yang masih belum mengalami penurunan yang signifikan, dan juga angka pertumbuhan penggunaan transportasi publik yang belum mengalami peningkatan signifikan. kedua perbandingan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan transportasi publik belum mampu mengintegrasikan semua kepentingan terkait transportasi publik. Proses musyawarah sebagai metode yang diharapkan menjadi jalan perumusan, dan formulasi sebuah kebijakan untuk mempertemukan kepentingan *bottom up* dan kepentingan teknokratik *top down*.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Kraft dan Furlong yang menjelaskan bahwa: *“public Policy is what public officials within government, and by extension the citizens they represent, choose to do or not to do about public problem”* (Kraft & Furlong, 2018). dari penjelasan dimaksud dibutuhkan proses musyawarah untuk

mempertemukan kedua kepentingan ini perlu untuk memperoleh keseimbangan kepentingan dalam melahirkan kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pelaksana dan penanggungjawab kebijakan. Hal tersebut penting menjadi perhatian semua pihak karena prinsip dalam kebijakan publik sangat erat terkait dengan karakter wilayah kebijakan tersebut akan berlaku (Muchlis Hamdi, 2013). hal yang sama disampaikan oleh Kian dan Sabri 2021 bahwa “*jalan menuju pembangunan yang adil secara sosial bergantung pada banyak faktor geografi ekonomi, struktur sosial suatu negara dan faktor sejarah*” (Kian et al., 2021). Sejalan dengan pandangan itu, pada kebijakan transportasi publik oleh pemerintah wajib membahas manajemen isu dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan untuk dapat terlibat dalam menyediakan transportasi terintegrasi secara berkelanjutan (Andoko et al., 2021).

Pandangan di atas, mengandung makna bahwa kebijakan yang telah disepakati dan ditetapkan, perlu dilaksanakan untuk menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, yang nantinya akan memberikan dampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. disamping itu kebijakan manajemen transportasi sebagai bagian dari sebuah sistem juga memberikan dampak kepada sistem lain. Kebijakan transportasi sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan sebuah kota menuju arah positif, beberapa tahun belakangan semakin banyak daerah perkotaan besar dunia telah menghadapi problematika transportasi. pertumbuhan sebuah kota pasti didukung tingginya aktivitas masyarakat yang menggerakkan seluruh aspek baik ekonomi, sosial maupun kebudayaan. hal tersebut seperti yang disampaikan Schobel bahwa: “*...There are economical, environmental, and sosial reasons for considering the needs of customers when planning public transportation*”(Schöbel, 2006).

Kehidupan masyarakat modern memiliki ketergantungan pada transportasi publik baik terkait dengan perpindahan tempat maupun terkait dengan distribusi kebutuhan masyarakat. ketika kebijakan transportasi menjadi sistem yang baik pada proses pembangunan, maka pada saat yang sama akan mempengaruhi mendorong perkembangan positif pembangunan suatu negara. hal tersebut sejalan dengan pandangan Richard Iles yang menyatakan bahwa: “*A good transport system is vital to a country's development; at the same time the factors affecting the development of a country play an important part in determining the way in which its transport sistem evolves*” (Iles, 2005). Iles menambahkan bahwa untuk memastikan sistem transportasi berkembang secara positif diukur dari kondusifnya pelaksanaan kebijakan sistem transportasi tersebut.

Kebijakan transportasi perkotaan menjadi sebuah kewajiban pemerintah untuk mengatur sistem transportasi serta menjamin kelancaran aktivitas masyarakat, kebijakan transportasi perlu mendapatkan perhatian lebih untuk lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan alasan yang ditimbulkan pada berbagai sektor, hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Schöbel bahwa: “*There are economical, environmental, and sosial reasonsfor considering the needs of customers when planning publik transportation*” (Schöbel, 2006). Mobilitas masyarakat pada suatu titik yang memiliki daya Tarik besar tidak dapat dicegah/dihalangi, yang dapat dilakukan hanyalah mengatur sebijak mungkin untuk memastikan proses mobilitas berjalan lancar dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya. hal tersebut sejalan dengan pandangan *International Association of Public Transport* yang menjelaskan bahwa: “*Governments and publik transport operators share a common*

goal to ensure that publik transport is accessible to all, and that the pedestrian and traffic environments are designed and managed to enable people to reach and use publik transport safely and with confidence” (European Conference of Ministers of Transport. et al., 2004).

Kebijakan tentang transportasi juga bukan hanya memberikan pengaruh pada kelancaran mobilitas masyarakat dan barang, namun kebijakan transportasi juga akan memberikan pengaruh pada aspek ekonomi makro suatu wilayah. secara teknis bisa terjadi terkadang kebijakan transportasi publik yang diambil jika diambil kebanyakan bukan dari kacamata pengguna, sehingga kebijakan transportasi yang diambil mengalami salah satu dari jenis kegagalan yang keenam diungkapkan oleh Riant Nugroho yakni kegagalan implementasi karena tidak sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi. hal tersebut dikarenakan sebagian besar dari pengambil kebijakan bukan orang-orang yang langsung berinteraksi dengan permasalahan transportasi. hal tersebut terjadi karena masih ditemukan banyak anggota masyarakat yang belum percaya diri untuk menggunakan transportasi publik.

2.2. Aktualisasi Nilai Pancasila melalui Kebijakan Transportasi Publik yang Terintegrasi dan Terpadu di DKI Jakarta

Pancasila menurut Soekarno sebagai nilai-nilai yang bersumber dari pengalaman hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam lingkup Indonesia maupun dalam lingkup pergaulan global (Samekto & Purwanti, 2023). mendasari pandangan tersebut maka aktualisasi nilai Pancasila melalui kebijakan transportasi publik menjadi sangat penting karena merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. Proses yang panjang dihadapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola manajemen transportasi publik merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi, perkembangan dari masa ke masa menunjukkan perbaikan kualitas layanan transportasi publik yang melalui kebijakan agar memberikan kepastian jaminan beberapa aspek penting yakni: aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Aspek-aspek yang terkandung dalam kebijakan transportasi mengikat bagi Pemerintah dan Masyarakat dalam proses melaksanakan kebijakan manajemen transportasi publik. Isu Transportasi publik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki lingkup yang sangat luas, bukan hanya terkait dengan isu ekonomi semata, namun juga terkait dengan isu sosial. melalui adanya kebijakan pengintegrasian transportasi publik menjadi solusi kongkret mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, kemacetan serta kesehatan lingkungan, sekalipun tantangan akan sangat berat bagi kebijakan transportasi publik untuk membangun kekuatan sosial (Sumaedi et al., 2014).

Problematika transportasi publik yang telah ditetapkan dari masa pemerintahan ke masa pemerintahan mengartikan bahwa isu transportasi publik menjadi isu penting yang harus segera diselesaikan, di samping itu juga menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. sehingga berbicara tentang kebijakan yang terkait publik dan pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat, maka landasan idiil yang tepat adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber nilai sebagai pedoman etis pemerintahan dalam menerapkan kebijakan publik yang terkait dengan tujuan hadirnya pemerintahan. Gambaran tersebut juga mendasari kebijakan transportasi publik di DKI tersebut mengartikan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada niat baik untuk memperbaiki kualitas layanan manajemen transportasi publik di Provinsi

DKI Jakarta sebagai solusi atas masalah Ekonomi, dan Sosial. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa pengintegrasian sistem transportasi antar moda transportasi hadir untuk mendukung ruang dan gerak masyarakat tertentu, sekaligus mentransformasikan kualitas layanan yang lebih baik melalui berbagai kerja sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan melalui manajemen yang efektif dan efisien (Andoko et al., 2021). realitas kemacetan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah DKI Jakarta menjadikan Kebijakan tersebut sebagai solusi untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam beraktivitas, di lain sisi kebijakan tersebut juga menjadi alternatif perbahanan sosial masyarakat yang akan menggunakan kendaraan pribadi dalam beraktivitas di wilayah DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi publik.

Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Transportasi yang Terpadu dan Terintegrasi, sebagaimana diatur dalam salah satu solusi untuk memberikan pelayanan yang prima bagi pengguna transportasi publik di wilayah DKI Jakarta. sesuai dengan pasal 3 Peraturan Gubernur 68 tahun 2021 menyatakan bahwa aspek yang mendasari kebijakan tersebut adalah: Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Keterjangkauan, Kesetaraan, keteraturan dan Keandalan. ke semua aspek yang mendasari kebijakan ini merupakan bentuk aktualisasi dari nilai Pancasila yang menjadi simbol hadirnya negara untuk memberikan kualitas pelayanan prima bagi masyarakat. aspek yang tertuang dalam kebijakan tersebut merupakan langkah tujuan yang diharapkan dari kebijakan tersebut ketika dilaksanakan secara baik oleh semua aktor kebijakan. seharusnya kebijakan pengintegrasian transportasi dapat lebih luas mengatur hal-hal yang terkait dengan proses interaksi antar manusia di dalamnya, dan proses pertemuan berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. kohesi sosial yang tercipta dapat mendorong perkembangan positif berbagai aspek kehidupan masyarakat berasal dari pengalaman interaksi yang diperoleh dari penggunaan transportasi publik.

2.2.1. Aktualisasi Nilai Pancasila pada aspek Ekonomi

kebijakan pengintegrasian transportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada aspek ekonomi memiliki tujuan untuk menekan angka kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kemacetan yang timbul akibat penggunaan transportasi pribadi, sesuai data yang dirilis kementerian perhubungan dampak kerugian ekonomi yang timbulkan oleh kemacetan di wilayah DKI Jakarta diperkirakan sebanyak 65 Triliun rupiah (CNBC Indonesia, 2023). kerugian tersebut merupakan akumulasi dari pemakaian bahan bakar minyak yang terbuang percuma karena mengalami kemacetan. melalui kebijakan tersebut tawaran yang diberikan dengan mengintegrasikan seluruh moda transportasi darat yang ada di Jakarta sebagai daya Tarik untuk menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk bepergian. hal tersebut seperti yang terjadi pada negara-negara Eropa 40% dari jumlah penduduk Jerman Barat dan 50% kota-kota Jerman Timur hidup tanpa mobil. melalui penggunaan transportasi publik yang meningkat, dapat mendorong pertumbuhan usaha UMKM yang berjualan pada stasiun-stasiun transportasi publik, untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah melalui kebijakan pengintegrasian sistem transportasi juga diharapkan menjadi pendorong adanya peningkatan pendapatan daerah sebagai salah satu alternatif pendapatan asli daerah DKI Jakarta. Kebijakan integrasi seluruh sistem transportasi publik merupakan kebijakan investasi daerah yang diharapkan memiliki memiliki dampak pada ekonomi daerah, hal

tersebut tergambar pada pasal 5 ayat (2) Peraturan gubernur yang mengamanatkan keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha lain untuk terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan tersebut. kenyataan yang terjadi bahwa terbentuknya PT. Jaklingko merupakan kerja sama antar BUMD di Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah provinsi sebagai pemodal dalam menjalankan PT. Jaklingko sebagai Operator pengintegrasian moda transportasi.

Kebijakan tersebut juga menjadi dasar perubahan *branding* kebijakan transportasi umum DKI Jakarta yang dikatakan akan mendukung masyarakat dalam bepergian di wilayah DKI Jakarta dengan mudah dan murah. akan tetapi pada kenyataannya ketertarikan penduduk DKI Jakarta yang menggunakan transportasi publik hanya kisaran 10% dari total jumlah penduduk yakni kisaran 1 Juta Orang dibandingkan jumlah penduduk yang mencapai 11 Juta orang sekali. hal tersebut perlu memenuhi 2 persyaratan agar kebijakan transportasi memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh..... bahwa “... *The traveller must see public transport as offering advantages over other forms of access... dan Apart from transport facilities, the other conditions for economic activity, such as demand for goods, competitiveness of the locality, must be satisfied*” (JSimpson, 2003). kedua pertimbangan ekonomi dalam perumusan kebijakan Transportasi publik tersebut sering sekali diabaikan oleh pembuat kebijakan, sehingga kebijakan tidak memberi dampak perbaikan yang signifikan pada masalah transportasi publik di DKI Jakarta.

Pada tataran pelaksanaan, kebijakan tersebut dengan mengintegrasikan beberapa moda transportasi dari MRT, LRT, Angkutan Transjakarta, Angkutan *Feeder* dan Angkutan lain, merupakan bentuk gotong royong yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Masyarakat. melalui perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, mendorong adanya pemanfaatan teknologi dalam pembayaran. mekanisme pembayaran yang diintegrasikan, memberikan kepastian harga bagi konsumen untuk mendapatkan kepastian harga dalam perjalanan dengan moda transportasi yang dipilih. melalui pengintegrasian sarana dan prasarana halte yang dikembangkan oleh Provinsi DKI Jakarta memberikan peluang usaha bagi UMKM untuk membuka usaha pada stasiun atau halte transit memberikan peluang perkembangan ekonomi bagi masyarakat serta memberikan kesempatan peluang adanya penambahan tenaga kerja baru untuk menjalankan usaha UMKM pada tempat yang telah disediakan. dari sektor ekonomi adanya kebijakan pengintegrasian tersebut akan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui tumbuhnya UMKM yang akan berusaha pada lokasi-lokasi yang telah disediakan.

2.2.2. Aktualisasi Nilai Pancasila pada Aspek Sosial

Aspek sosial menjadi tantangan terberat, banyak pelanggaran hukum yang terjadi di Transportasi publik, menjadi tantangan masalah sosial. diharapkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 68 tahun 2021 yang mengamanatkan perlunya dukungan kerja sama dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sistem diharapkan memperketat proses pengawasan untuk menekan terjadinya pelanggaran hukum. sejalan dengan hal tersebut oleh *International Association of Public Transport* mengharapkan adanya kerja sama juga sebagai upaya untuk mengurangi bukan hanya hambatan fisik namun

hambatan psikologi bagi pengguna transportasi publik sebagaimana pendapatnya bahwa: “*In this pursuit, government and the publik transport community must work together to reduce not only physical, but also psychological barriers (cognitive, information, fear, discrimination) to safe and seamless travel in cities*” (European Conference of Ministers of Transport. et al., 2004).

Hal tersebut sejalan dengan Pancasila sebagai dasar nilai moral kehidupan bersama yang mewajibkan pemerintah untuk menciptakan kenyamanan dan kemanfaatan dari kebijakan yang telah ditetapkan. diharapkan melalui pengintegrasian sistem operasional transportasi menjadikan sinergitas antara unit moda transportasi untuk saling mendukung untuk menjaga kondusifitas interaksi antar pelaku perjalanan. melalui mekanisme kerja sama tersebut yang diatur, mengantisipasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara masing-masing moda transportasi, malah sebaliknya seluruhnya bergotong-royong menjadi satu kesatuan untuk memberikan layanan prima.

Selain adanya kebijakan pengintegrasian sarana prasarana transportasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta diharapkan sesuai dengan rumusan peran penting dari Transportasi publik dirumuskan oleh *International Association of Publik Transport* sebagai hal terpenting dari sebuah kebijakan transportasi publik bahwa: “*Public transport has a key role to play in improving accessibility for all individuals, thereby minimising social exclusion and enhancing sosial cohesion.*” (European Conference of Ministers of Transport. et al., 2004). dari rumusan tersebut kita dapat memahami bahwa sebuah kebijakan transportasi publik bukan hanya pada lingkup perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, namun lebih penting dari itu adalah kebijakan transportasi publik juga berkaitan dengan menjaga harkat dan martabat pengguna transportasi publik serta perannya meningkatkan kohesi sosial.

Aspek kohesi sosial yang ditekankan pada kebijakan transportasi merupakan gambaran aktualisasi nilai Pancasila yang diharapkan proses interaksi sosial di ruang-ruang transportasi publik memberikan bukan hanya pembelajaran namun juga pengalaman pribadi untuk lebih mengenal banyak karakter manusia sehingga lebih memperkuat tatanan sosial. solidaritas sosial yang muncul pada ruang-ruang interaksi manusia sangat banyak terjadi pada sarana dan prasarana transportasi publik. terbentuknya kesadaran untuk saling tolong menolong memberikan tempat duduk merupakan praktik baik yang sering dipraktikkan untuk memberikan ruang interaksi sosial yang baik bagi sesama pengguna yang dapat memperkuat aktualisasi nilai sila-sila Pancasila.

Pengintegrasian transportasi publik juga setidaknya harus memberikan manfaat bagi pengguna yang berkebutuhan khusus, hal tersebut seperti yang dirumuskan oleh *International Association of Publik Transport* bahwa: “*Further, providing access for disabled people to publik transport is not an isolated endeavour: it is a crucial part of a quality approach to publik transport services, which ensures that all passengers are provided with a high standard of public transport*” (European Conference of Ministers of Transport. et al., 2004). pandangan tersebut merupakan aktualisasi dari sila keadilan sosial yang menjadi tantangan dari pembangunan dan kebijakan yang selama ini belum terwujud sepenuhnya. melalui keadilan yang diterima oleh pengguna berkebutuhan khusus dapat menjadi proses pembelajaran bagi pengguna lain untuk memperoleh pengalaman berinteraksi yang membentuk pemahaman baik dari hasil interaksi yang terjadi.

3. Kesimpulan

Kebijakan Transportasi di Provinsi DKI melalui Peraturan Gubernur Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem transportasi terpadu terintegrasi masih hanya memfokuskan kebijakan pengintegrasian sarana dan prasarana saja, padahal peluang pengaturan transportasi publik masih luas untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat dari aspek Ekonomi dan Sosial. Pancasila sebagai nilai kehidupan dapat menjadi kerangka acuan kebijakan transportasi publik mampu mendukung juga perubahan dan peradaban Masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di ruang Publik dari proses interaksi antar pengguna transportasi melalui tindakan saling tolong menolong, saling menghormati sehingga mewujudkan keadilan sosial serta meningkatnya kohesi sosial diantara masyarakat, proses pengintegrasian transportasi publik masih belum sepenuhnya menjangkau harapan tersebut karena masih pada ruang lingkup efektivitas dan efisiensi perpindahan pengguna moda transportasi publik. Kebijakan transportasi publik Jakarta kedepannya dapat diarahkan menjadikan sarana prasarana transportasi publik sebagai media aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui proses interaksi antar pengguna transportasi publik.

Daftar Pustaka

Buku

- Ashraf Ghani and Clare Lockhart. (2008). *Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World*.
- European Conference of Ministers of Transport., International Union of Public Transport., & Organisation for Economic Co-operation and Development. (2004). *Improving access to public transport*. ECMT.
- Iles, R. (2005). *Public Transport in Developing Countries*. Elsevier Ltd, UK British
- JSimpson, B. (2003). *Urban Public Transport Today*, E&FN Spon, London
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2018). *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives: Vol. Sixth Edition*.
- Muchlis Hamdi. (2013). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- Muchlis Hamdi. (2024). Kebijakan Publik untuk Keberlanjutan Pemerintahan Amanah. In *Kebijakan Publik untuk Keberlanjutan Pemerintahan Amanah*. IPDN.
- Riant Nugroho. (2018). *Public Policy Dinamika Kebijakan Publik Analisis Kebijakan Manajemen Politik Kebijakan Etika Kebijakan: Vol. Revisi Keenam* (Cetakan Kedua). Elex Media Komputindo.
- Rias Rasyid. (1998). *Pemerintahan yang Amanah*. Binarena Pariwisata.
- Schöbel, A. (2006a). *Optimization in public transportation: stop location, delay management and tariff zone design in a public transportation network*. Springer.

Jurnal

- Andoko, B. W., Setiawan, D., Purnomo, E. P., Salsabila, L., & Fais, K. (2021). *Public Policies for Creating Sustainable and Integrated Transport in Jakarta* (pp. 523–530). https://doi.org/10.1007/978-3-030-71782-7_46
- Kian, L., Purwanti, A., & Sabri, M. (2021). Internalisasi Dan Instansionalisasi Kebijakan Ekonomi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 45–56. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.23>

- Samekto, A., & Purwanti, A. (2023). Perubahan Tatanan Sosial dan Transformasi Pemaknaan Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.132>
- Sumaedi, S., Bakti, I. G. M. Y., Astrini, N. J., Rakhmawati, T., Widiyanti, T., & Yarmen, M. (2014). *Public Transport Passengers' Behavioural Intentions*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-4585-24-8>

Berita Online

- Berita Satu. (2023, October 9). *Kejahatan Seksual Terjadi di Transportasi Umum Sepanjang 2022*. <https://www.beritasatu.com/megapolitan/1066000/lpsk-3539-kejahatan-seksual-terjadi-di-transportasi-umum-sepanjang-2022>.
- CNBC Indonesia. (2023, October 30). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231030123147-4-484784/kemacetan-menggila-bikin-ri-rugi-triliunan-dki-sampai-rp65-t#:~:text=%22Kerugian%20ekonomi%20akibat%20kemacetan%20lahu,Rp%2012%20triliun%20per%20tahun>.
- Tomtom Traffic Index. (2023, December 28). *Traffic Index*. <https://www.tomtom.com/traffic-index/ranking/?Population=MEGA>.